

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pentingnya isu pembangunan berkelanjutan semakin meningkat dan menarik perhatian saat ini. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada konsep pembangunan yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi harus dilengkapi dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, serta pemerataan kesejahteraan di antara berbagai kelompok masyarakat (Setiati<sup>1</sup> et al. 2020).

Kesejahteraan manusia dan keberlangsungan makhluk lainnya sangatlah bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat, di mana keduanya saling memengaruhi secara besar-besaran. Dampak alam terhadap manusia biasanya bersifat lebih tidak langsung, sementara manusia memiliki pengaruh yang lebih aktif terhadap lingkungan. Dengan kata lain, jika kondisi lingkungan di suatu wilayah membaik, maka kesejahteraan manusia yang tinggal di lingkungan tersebut kemungkinan besar akan meningkat, dan sebaliknya (Hidayati, 2022).

Menurut Sandila et al (2020) Tantangan Pembangunan nasional salah satunya adalah pendayagunaan sumberdaya untuk ekonomi dan pengelolaan sumber daya berwawasan lingkungan baik secara nasional maupun regional di Indonesia. Komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan warganya ditunjukkan melalui

konsep pembangunan berkelanjutan. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Dalam konteks keberhasilan Pembangunan berkelanjutan selalu terkait dengan daya dukung lingkungan yang diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Hal tersebut menggambarkan tentang indikasi awal yang digunakan untuk melihat kondisi lingkungan hidup. Pengembangan sumber daya wilayah berperan ganda sebagai sumber permodalan bagi pertumbuhan ekonomi (*resourced economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support economy*). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keberhasilan pembangunan daerah selalu dikaitkan dengan daya dukung lingkungan hidup yang diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pembangunan berkelanjutan bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab atas ekosistem lokal mereka. Kontribusi manusia terhadap kelestarian ekosistem ditentukan oleh pembangunan yang mengutamakan indikator ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam (Haris et al. 2023).

Dalam al quran telah dijelaskan tentang larangan allah kepada manusia untuk merusak lingkungan

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya "Janganlah berbuat kerusakan di bumi!" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan" (Q.S Al-Baqarah ayat 11) .

Dan dalam kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir, perbuatan yang merusak bumi akan membahayakan semua hamba Allah SWT. Hal inilah yang membuat Allah SWT melarang perbuatan tersebut.

Secara sederhana, kualitas lingkungan hidup mengacu pada kondisi lingkungan yang mampu memberikan dukungan optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Mutu lingkungan hidup juga tercermin dalam suasana yang memungkinkan masyarakat merasa nyaman dan betah tinggal di tempat tinggalnya sendiri. Lingkungan hidup yang baik memiliki peran penting dalam memfasilitasi perkembangan manusia secara optimal, sejalan, dan seimbang. Meskipun pembangunan di Indonesia telah berhasil meningkatkan pendapatan nasional, namun juga menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jika pencemaran dan kerusakan terus berlanjut, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang membahayakan kehidupan. Saat ini, kondisi menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam kualitas dan daya dukung lingkungan. (Suryani 2018).

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023), luas Kawasan Hutan Indonesia mencapai 125.795.306 hektar, dengan panjang batas sepanjang 373.828,44 kilometer. Batas ini terdiri dari 283.032,03 kilometer batas luar dan 89.796,1 kilometer batas fungsi kawasan hutan. Hingga bulan Desember tahun 2022, telah dilakukan penataan batas kawasan hutan sepanjang 332.184,0 kilometer (88,88%) yang terbagi menjadi penataan batas luar kawasan hutan sepanjang 2.387,8 kilometer (65%) dan penataan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 89.796,1 kilometer (24%). Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional pada tahun 2022 mencapai 72,42, melebihi target yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 69,22. Terdapat peningkatan sebesar 0,97 poin dari tahun sebelumnya.. Berikut ini merupakan capaian IKLH di Pulau Jawa:

**Tabel 1.1**  
**Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Pulau Jawa tahun 2018-2022**

	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Tengah	68,27	60,97	67,62	66,27	66,77
Jawa Timur	67,08	60,25	67,07	68,29	69,92
Jawa Barat	56,98	51,64	59,40	62,68	64,52
DI Yogyakarta	62,98	49,24	66,65	65,66	65,96
DKI Jakarta	45,21	42,84	52,98	54,43	54,65
Banten	57,00	51,09	59,36	64,14	63,41

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2023)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 pada tahun 2018 IKLH tertinggi dicapai oleh provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2021 dan 2022 IKLH tertinggi kembali dicapai oleh Provinsi Jawa Timur. Dari data 5 tahun tersebut Provinsi DKI Jakarta selalu berada pada IKLH terendah di Pulau Jawa.

Menurut Oktavia et al (2020) Sanitasi merujuk pada kondisi atau keadaan yang dapat memengaruhi kesehatan, terutama terkait dengan limbah manusia dan risiko infeksi yang terutama terkait dengan pengelolaan air limbah, pembuangan limbah, dan pengelolaan sampah rumah tangga. Sarana Sanitasi dasar merupakan syarat minimal lingkungan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendukung kesehatan lingkungan yang memadai. Sanitasi dasar ini penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dengan memperhatikan pengendalian berbagai faktor lingkungan yang memengaruhi kesehatan. Menurut Ariska et al (2019) kegiatan Sanitasi lingkungan merupakan usaha untuk mengontrol semua faktor lingkungan

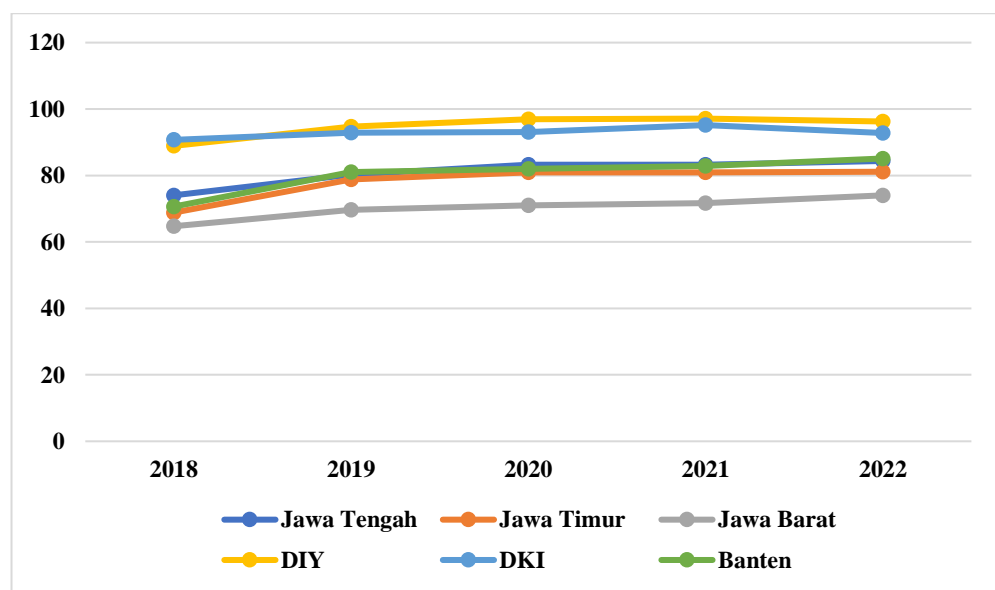
fisik yang mungkin menimbulkan atau berpotensi menimbulkan masalah dalam memenuhi kebutuhan Sanitasi.

Sanitasi dasar mencakup berbagai aspek penting seperti penyediaan air bersih, pembangunan fasilitas jamban, pengelolaan air limbah, dan manajemen sampah. Sanitasi merupakan elemen krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat. Ketidaklayakan Sanitasi dapat membawa dampak merugikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat, pencemaran sumber air minum, serta peningkatan insiden penyakit berbasis lingkungan, seperti penyakit diare (Oktavia et al, 2020).

Menurut Maliga et al (2022) Mencapai akses Sanitasi yang memadai sangatlah krusial untuk mempercepat kemajuan dalam bidang kesehatan. Kebersihan lingkungan mencakup aspek-aspek seperti kebersihan rumah tangga, sistem Sanitasi, dan penyediaan air bersih, yang semuanya merupakan indikator kesehatan lingkungan. Risiko Sanitasi mengacu pada bahaya terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan lingkungan yang disebabkan oleh akses yang kurang memadai terhadap layanan dan fasilitas Sanitasi, serta praktik Sanitasi yang buruk.

Sanitasi merupakan praktik yang sengaja dilakukan untuk menciptakan kebersihan dan mencegah manusia dari kontak langsung dengan kotoran dan limbah berbahaya lainnya, dengan tujuan menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Peningkatan sanitasi memiliki manfaat ekonomi yang meliputi pengurangan biaya kesehatan, penurunan jumlah hari absen kerja akibat penyakit atau perawatan keluarga yang sakit, dan penghematan waktu yang biasanya dihabiskan untuk menunggu di fasilitas sanitasi atau perjalanan menuju ke sana.

Sanitasi dianggap sebagai tujuan pembangunan penting, termanifestasikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-6, di mana masyarakat internasional berkomitmen untuk mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang memadai, serta untuk mengakhiri praktik buang air besar sembarangan pada tahun 2030 (Pangestu and Sitorus 2021). Berikut ini merupakan akses Sanitasi layak di pulau jawa pada tahun 2018-2022:



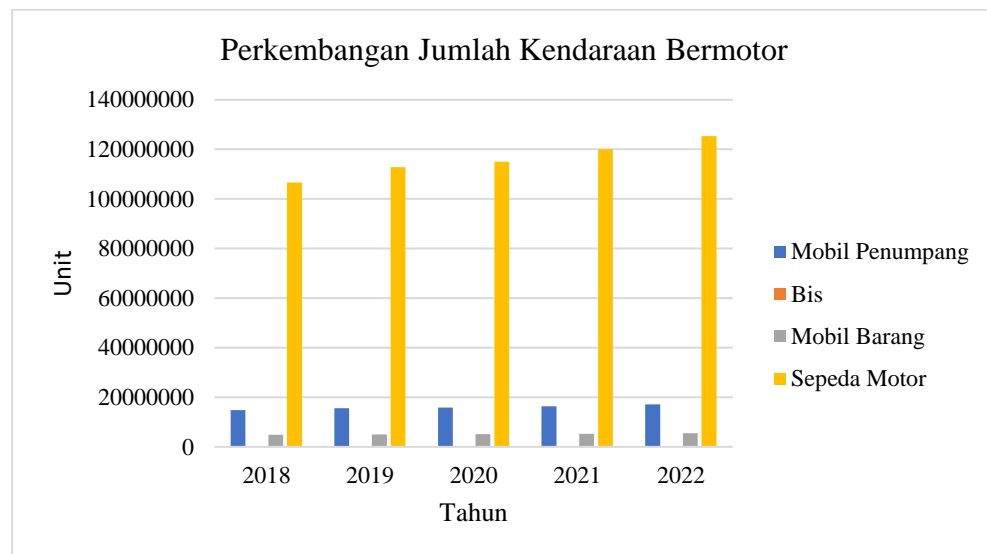
Sumber: Badan Pusat Statistik, (2023)

**Gambar 1.1**  
**Akses Sanitasi Layak di Pulau Jawa tahun 2018-2022**

Berdasarkan pada gambar 1.1 pada tahun 2018 Sanitasi tertinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 90,73. pada tahun 2019 sampai 2022 Sanitasi tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta. Sanitasi terendah berada pada tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat sebesar 64,73.

Dengan masuknya era industri 4.0, kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan pokok daripada sekunder. Hampir setiap rumah tangga memiliki kendaraan bermotor, bahkan seringkali lebih dari satu unit. Kendaraan bermotor

tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Pembelian kendaraan bermotor menjadi lebih mudah dengan berbagai cara, yang mendorong perilaku konsumtif di kalangan masyarakat (Fathur et al. 2021). Berikut merupakan banyaknya Transportasi di Pulau Jawa pada tahun 2018-2022:



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2023)

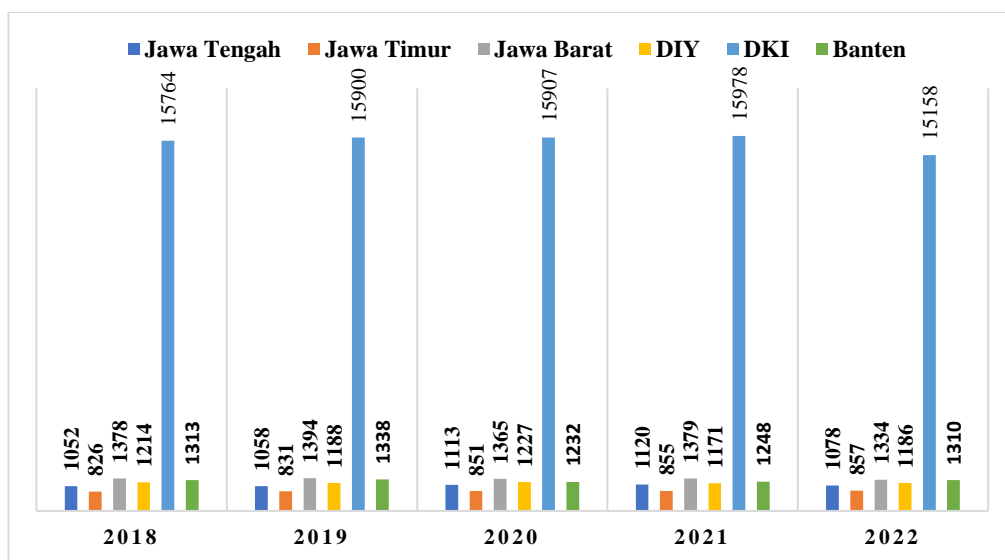
**Gambar 1.3**  
**Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)**

Berdasarkan Gambar 1.3 jumlah kendaraan bermotor yang paling banyak adalah sepeda motor setiap tahun dari 2018-2022. Jumlah sepeda motor yang paling banyak terdapat pada tahun 2022 sebanyak 125305332 unit. Perkembangan kendaraan bermotor paling sedikit adalah Bus setiap tahun dari 2018-2022.

Menurut Yuda and Idris (2022), Salah satu faktor yang berperan dalam menentukan kualitas lingkungan hidup adalah Kepadatan Penduduk. Peningkatan Kepadatan Penduduk di Indonesia berdampak negatif pada tingkat kualitas lingkungan hidup (KLH), karena pertumbuhan populasi yang terus meningkat

setiap tahunnya akan berimbas langsung pada kondisi lingkungan. Selain itu, pertumbuhan ini juga mengakibatkan peningkatan kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan volume polusi dan limbah di lingkungan sekitarnya. Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, cair, dan gas, yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.

Menurut Hety et al (2023) kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas daerah yang ditempati oleh mereka. Tingginya kepadatan penduduk dapat mengakibatkan sejumlah masalah kependudukan, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, kurangnya lapangan kerja, dan peningkatan kriminalitas. Selain itu, kepadatan penduduk juga dapat menghambat upaya peningkatan kualitas penduduk. Berikut ini merupakan data Kepadatan Penduduk di Pulau Jawa pada tahun 2018-2022:



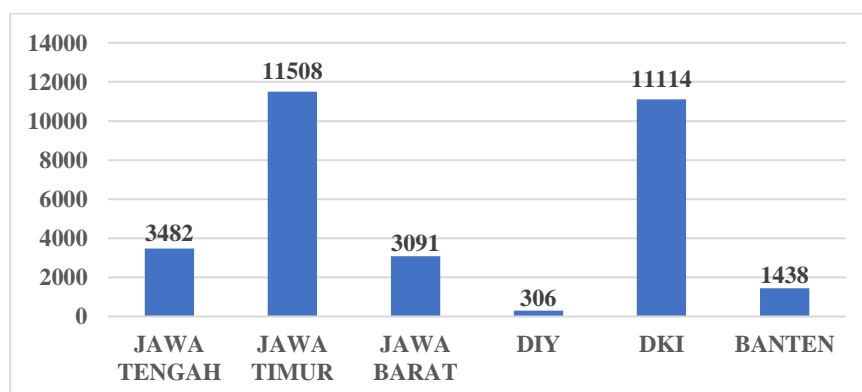
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

**Gambar 1.2**  
**Kepadatan Penduduk di Pulau Jawa Pada Tahun 2018-2022**



Menurut data pada Gambar 1.2 kepadatan penduduk yang paling tinggi berada pada provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2018-2022, serta provinsi yang memiliki kepadatan penduduk paling sedikit merupakan Prrovinsi Jawa Timur.

Menurut Fatimah et al (2024) hasil penelitian terbaru menunjukkan hubungan antara suhu lingkungan dan virus Covid-19. Virus ini merupakan jenis penyakit pernapasan yang dapat bertahan aktif selama berjam-jam. Di berbagai kota di seluruh dunia, terdapat indikasi bahwa penutupan sementara dapat menghentikan penyebaran virus Covid-19 dan berpotensi memiliki dampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan perjalanan internasional. Efek dari polusi udara mungkin dapat bertahan selama beberapa hari, dengan masa inkubasi virus ini berkisar 1-14 hari, sehingga menunjukkan adanya penurunan kasus polusi udara. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Badan Penerbangan Antariksa NASA menunjukkan bahwa pandemi ini memiliki dampak positif terhadap kondisi udara. Setelah pandemi Covid-19, beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya dan DKI Jakarta mengalami peningkatan yang stabil dalam kualitas udara. Berikut ini merupakan data kasus covid-19 pada september 2022:



Sumber: Kementerian Kesehatan

### **Gambar 1.3** **Kasus Covid-19 Pada Bulan September Tahun 2022**

Menurut tabel 1.3 pada bulan september tahun 2022 pulau jawa, kasus covid-19 paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur dengan angka 11.508 sedangkan yang selanjutnya adalah Provinsi DKI Jakarta dengan angka covid-19 sebanyak 11.114, yang ketiga adalah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.482, dilanjutkan dengan Provinsi Jawa Barat sebanyak 3.09, dan Provinsi Banten sebanyak 1.438, serta yang terakhir adalah Provinsi DIY dengan kasus covid-19 paling sedikit di Pulau Jawa yaitu sebesar 306.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin beragamnya aktivitas, menyebabkan padatnya populasi di DKI Jakarta. Menurut laporan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, terjadi peningkatan produksi emisi pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Beberapa sektor industri yang mengalami peningkatan produksi emisi antara lain industri logam sebesar 7,54%, industri kelistrikan sebesar 9,07%, industri tekstil sebesar 10,13%, dan industri otomotif sebesar 1,47%. Pertambahan penduduk di kota metropolitan seperti DKI Jakarta juga dapat memperparah polusi udara dari kendaraan bermotor, yang merupakan sumber utama pencemaran udara di Jakarta (Fatimah et al 2024).

Menurut kusumaningtyas (2024), wabah penyakit Covid-19 yang telah menyebar di seluruh dunia telah menimbulkan berbagai masalah, terutama ketika beberapa negara menerapkan kebijakan social distancing, seperti pembatasan aktivitas manusia mulai dari skala terbatas hingga penguncian total yang disebut lockdown. Kebijakan ini telah berdampak pada sistem politik dan ekonomi,

terutama dalam sektor pariwisata. Namun, di sisi lain, terjadi penurunan dramatis dan signifikan dalam emisi polusi udara. Di Indonesia, khususnya di Jakarta, Covid-19 pertama kali terdeteksi pada Februari 2020 dan mulai menyebar sekitar pertengahan Maret 2020. Sebagai respons, kebijakan bekerja dari rumah mulai diterapkan di Jakarta pada 16 Maret 2020, dan kemudian pada tanggal 7 April 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi diterapkan di DKI.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2022) terdapat hubungan yang signifikan antara transportasi darat, IPM, dan kepadatan penduduk terhadap IKLH di Indonesia pada tahun 2017-2019. Data analisis menunjukkan bahwa kepadatan populasi dan sistem transportasi darat memiliki dampak yang signifikan, sedangkan sanitasi layak tidak adanya hubungan yang signifikan terhadap IKLH di Indonesia selama periode tersebut. Khususnya, pada tahun 2017, Kepadatan Penduduk memiliki pengaruh yang paling besar terhadap IKLH.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noormalitasari et al (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Environmental Quality Index* (EQI). Masyarakat miskin, Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rumah Tangga Kumuh memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap EQI, sementara Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak serta Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap EQI. Rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan juga memiliki pengaruh positif terhadap EQI, meskipun tidak signifikan. Namun, keberadaan hutan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap EQI.

Alasan penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa yaitu menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Pada tahun tersebut, kepadatan penduduk Pulau Jawa mencapai 1.063 orang per kilometer persegi. Serta menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Pulau Jawa memiliki kepadatan transportasi darat yang tertinggi di Indonesia. Pulau Jawa juga mencatat jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia pada tahun tersebut, dengan total mencapai 139,7 juta unit.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh sanitasi terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Pulau Jawa
2. Bagaimana pengaruh transportasi darat terhadap indeks kualitas lingkungan hidup di Pulau Jawa
3. Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap indeks kualitas lingkungan hidup di Pulau Jawa
4. Bagaimana pengaruh covid-19 terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Pulau Jawa
5. Bagaimana perbedaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di DKI Jakarta dengan Provinsi Lainnya di Pulau Jawa

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis besarnya sanitasi terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Pulau Jawa
2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh transportasi darat terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Pulau Jawa

3. Untuk menganalisis besarnya pengaruh kepadatan penduduk terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Pulau Jawa
4. Untuk menganalisis pengaruh covid-19 terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Pulau Jawa
5. Untuk menganalisis perbedaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di DKI Jakarta dengan Provinsi Lainnya di Pulau Jawa

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat di bidang teoritis.

Beberapa manfaat yaitu dapat membantu dalam pengembangan teori dan kerangka konseptual yang lebih kuat tentang bagaimana faktor-faktor tersebut yang akan membantu memperkaya pengetahuan tentang hubungan antara variabel-variabel yang kompleks. Selain itu hasil dari penelitian ini digunakan untuk merivisi teori-teori yang ada, jika hasil dari penelitian ini tidak sesuai atau kurang sesuai maka hal ini dapat membuka pintu untuk peninjauan ulang teori-teori yang telah ada sebelumnya. Serta dapat memberikan kontribusi pada pemahaman baru dalam ilmu lingkungan dan pembangunan, serta membuka peluang bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat di bidang praktik.

Data dan temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk pedoman dalam menyusun rencana pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. hal tersebut dapat membantu dalam menetapkan prioritas-prioritas

pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

3. Manfaat untuk pengambilan Keputusan.

Data dan temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk membantu dalam merancang strategi pembangunan jangka Panjang yang berkelanjutan. Hal ini termasuk strategi pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran serta mempertimbangkan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.